

AGENSI SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PRAKTIK REKACIPTA PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI (PBB) SETU BABAKAN

ABSTRAK

Oleh:

Ariesta Amanda

14/371756/PSP/05130

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi praktik rekacipta Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan melalui agensi sosial yang terlibat dalam pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam yang berlokasi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang melibatkan Unit Pengelola Kawasan (UPK), Forum pengkajian dan pengembangan (Jibang), Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), komunitas Betawi, masyarakat setempat maupun wisatawan yang berkunjung ke Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Analisis data yang dilakukan meliputi pengumpulan data, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkampungan Budaya Betawi merupakan hasil rekacipta politik yang dirancang oleh sekelompok elit Betawi dalam Lembaga Kebudayaan Betawi yang dimunculkan sebagai representasi masyarakat Betawi secara umum. Gagasan tersebut kemudian didukung oleh Pemerintah Daerah (Suku Dinas Pariwisata dan kebudayaan) untuk perlindungan tradisi budaya Betawi. Namun dalam praktiknya terdapat kontradiksi atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dan aplikasi dalam praktik pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi. Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan saat ini di rekacipta sebagai wisata budaya oleh Pemerintah Daerah dengan dalih penyelamatan aset budaya daripada pemberdayaan eksistensi budaya Betawi bagi etnis Betawi itu sendiri.

Peranan agensi sosial menunjukkan bahwa pengaruh elit Betawi dan Forum Jibang berperan sebagai pengawas kebijakan dan pengembangan. Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan bersifat *top-down* dengan adanya dominasi pemerintah yang sangat tinggi. Kepentingan pemerintah daerah secara institusional maupun elit Betawi secara individual dalam kasus ini mencerminkan bagaimana budaya Betawi dijadikan sebagai bisnis kultural. Dalam konteks inilah keberadaan Perkampungan Budaya Betawi lebih dijadikan sebagai arena reproduksi ekonomi dan politik daripada arena reproduksi sosial dan budaya.

Kata kunci : Agensi, Arena, Masyarakat Betawi, Perkampungan Budaya



SOCIAL AND CULTURAL AGENCIES IN THE ESTABLISHMENT OF BETAWI CULTURAL VILLAGE (PBB) SETU BABAKAN

ABSTRACT

By:

Ariesta Amanda

14/371756/PSP/05130

This study aims to criticize the practice of establishing Betawi Cultural Village (PBB) Setu Babakan by the social agencies involved in the development of Betawi Cultural Village (PBB) Setu Babakan. This study employs a qualitative method, more specifically employs with in-depth interviews that took place in Setu Babakan Betawi Cultural Village, Srengseng Sawah, Jagakarsa Sub-district, South Jakarta. Data obtained through observations and interviews involving unit area managers (UPK), Assessment and Development (Jibang), Betawi Cultural Institutions (LKB), Betawi community, local people and tourists who visited the Betawi Cultural Village Setu Babakan. The data analysis was conducted on the collection of data, triangulation, data presentation, and conclusion.

This study shows that the Betawi Cultural Village is a result of political construct designed by the Betawi elites, such as: Betawi cultural institutions, who claimed to represent the Betawi community in general. The idea was then supported by the local government (Dept. of tourism and culture) of the protection of the cultural tradition of Betawi. In fact, there are many contradictions of the policies issued by local government through their applications. The Betawi Cultural Village Setu Babakan today is functioned more as a involved of development objects of cultural tourism on behalf of cultural preservation rather than empowered the cultural existence of the Betawi community themselves.

The roles of social agencies show that the influences of the Betawi elites and particular group like the Assessment and development (Jibang) acted more as the watchdogs in the top-down model of surveillance controlled by the local government. The interests of the local government and the Betawi elites have proved that cultural preservation is treated more as cultural business. In this context, the existence of the Betawi Cultural Village represents more as a field of economic and political reproduction rather than social and cultural reproduction.

Keywords: Agency, Field, Betawi Community, Culture Village